



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2022



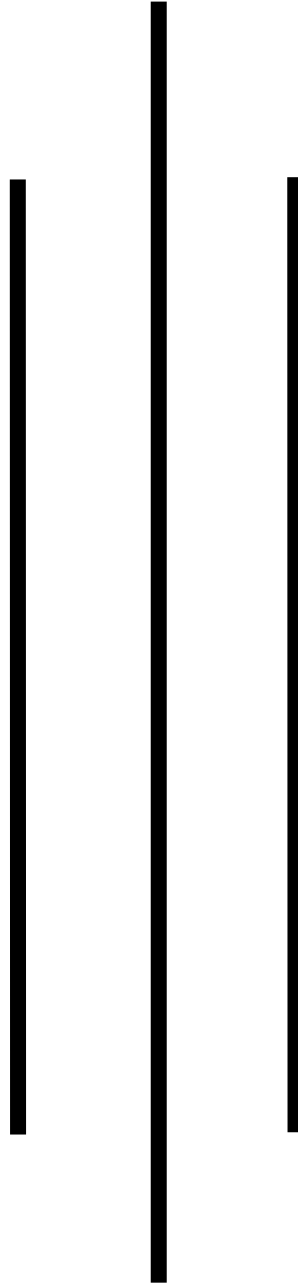
**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
2023**



LAPORAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA



TAHUN 2023

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri utama negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*Good Governance*). Tak hanya itu, informasi publik juga memainkan peranan yang penting bagi pengembangan pengetahuan dan kesejahteraan warga.

Indonesia telah menjamin hak Warga Negara dalam memperoleh informasi publik melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa Badan Publik, baik lembaga negara maupun organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri, wajib melaksanakan pelayanan informasi publik.

Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendukung keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan partisipatif sesungguhnya telah tercetus jauh sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 diterapkan. Pada tahun 2003, Pemerintah Kota Yogyakarta memperkenalkan layanan bernama Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK).

Melalui layanan berbasis SMS ini, publik dapat melayangkan keluhan atau meminta informasi seputar layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sejalan dengan perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, pada tahun 2022 diterbitkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207 Tahun 2022 tentang Penunjukan PPID Utama dan PPID Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Keputusan ini menetapkan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai PPID Utama yang bertanggung jawab kepada Atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah.

Selain itu, ditetapkan pula 52 PPID Pelaksana yang bertugas melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah. Ketugasan PPID Pembantu ini melekat pada jabatan Sekretaris untuk OPD setingkat eselon II dan Pejabat Struktural yang membidangi Tata Usaha untuk OPD setingkat eselon III. Tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi bagian dari PPID Pembantu.

Dalam melaksanakan ketugasannya ditetapkan pula Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nomor : 21/Kep/Kominfosan/II/2022 Tentang Penunjukan Petugas Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022. Ketugasan ini melekat pada petugas yang memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas, telah disusun pula Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik Kota Yogyakarta yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nomor : 8.C/Kep/Kominfoan/I/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian

Kota Yogyakarta Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nomor : 21.A/Kep/Kominfoan/II/2022 Tentang Mekanisme Alur Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022.

Sebagai petunjuk dan pedoman bagi Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) ditetapkan pula Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor : 27/Kep/Kominfoan/II/2022 Tentang Daftar Informasi Publik Kota Yogyakarta dan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor : 28/Kep/Kominfoan/II/2022 Tentang Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kota Yogyakarta.

Pelayanan terhadap permohonan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini dilakukan secara terpusat pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Meskipun demikian, mengingat banyaknya informasi publik yang dikuasai oleh tiap-tiap PPID Pelaksana, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik menjadi tanggung jawab dari masing-masing PPID Pelaksana.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

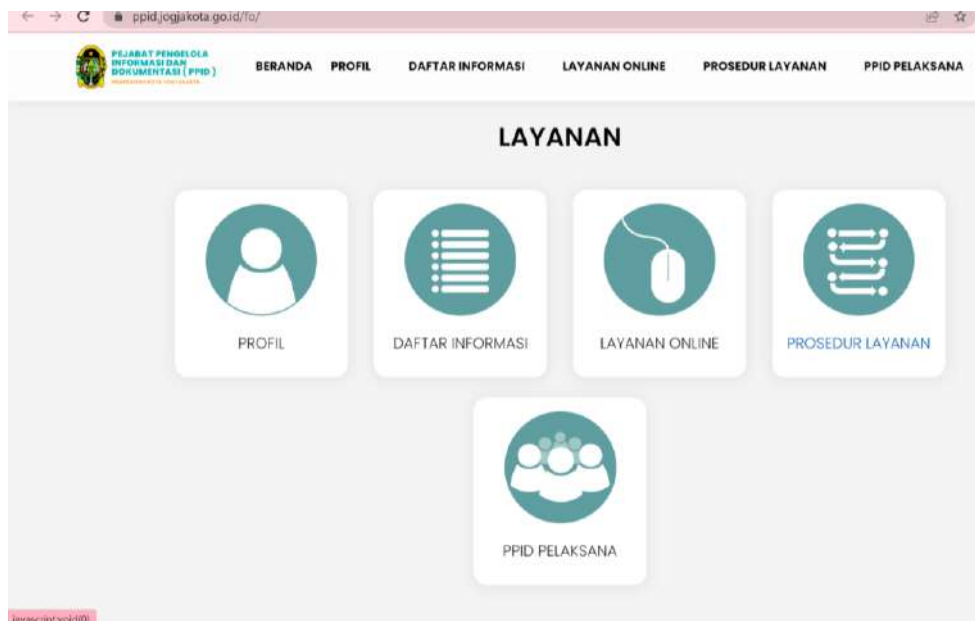
A. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi pasal 24 ayat (3) disebutkan bahwa Badan Publik wajib mengumumkan dan menyebar luaskan informasi melalui berbagai kanal seperti papan pengumuman, website maupun media sosial.

Untuk media website, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memuat informasi publik pada portal jogjakota.go.id. Informasi tersebut juga dapat diakses pada subdomain ppid.jogjakota.go.id. Pada tahun 2019, seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja hingga di tingkat Kelurahan telah memiliki dan mengelola Sub Domain/Website. Konten informasi publik di setiap subdomain ini diupayakan memuat informasi publik yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.



Gambar 1. Tangkapan Layar Portal jogjakota.go.id



Gambar 2. Tangkapan Layar Sub Domain *ppid.jogjakota.go.id*

Informasi publik terkait pelaksanaan program kota dan kegiatan Walikota/Wakil Walikota juga dapat diakses melalui aplikasi android Jogja Smart Service dan media sosial yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Saat ini terdapat empat platforms media sosial yang digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Twitter (PemkotJogja), Instagram (@pemkotjogja), Facebook (Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta) serta Kanal Youtube YKTV.

Papan pengumuman dalam bentuk klasikal maupun digital telah disediakan di beberapa titik di kantor Balaikota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta juga menggunakan media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik seperti radio dan televisi lokal, serta media luar ruang dalam bentuk baliho. Pada tahun 2022, Pelayanan informasi tatap muka dilaksanakan melalui berbagai kegiatan di wilayah.

Selain memberikan pelayanan informasi publik, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menyelenggarakan pelayanan permohonan informasi publik. Untuk menunjang pelayanan permohonan ini, telah disediakan sebuah ruangan yang difungsikan secara khusus untuk melayani

masyarakat yang datang langsung dan mengajukan permohonan informasi public.



Gambar 3. Fasilitas Pelayanan Informasi Publik.

Ruang Pelayanan Informasi ini berada di Mal Pelayanan Publik Kompleks Balaikota Yogyakarta serta Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Ruangan ini dilengkapi dengan satu unit komputer, satu pesawat telepon, dan tempat duduk untuk petugas dan penerima layanan. Publik juga dapat melakukan permohonan informasi secara online dan penyampaian keberatan melalui ppid.jogjakota.go.id dan e-mail ppid@jogjakota.go.id. Layanan online melalui website ini telah tersedia sejak tahun 2019.

Masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan terkait Pemerintah Kota Yogyakarta juga dapat mengakses layanan UPIK melalui SMS 08122780001 dan aplikasi Jogja Smart Service yang dapat diunduh melalui ponsel berbasis android. Selain itu masyarakat juga dapat aplikasi SP4N Laporan! yang merupakan aplikasi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Permohonan informasi publik yang disampaikan melalui kanal pengaduan dan informasi ini akan diproses sesuai dengan tata cara dan prosedur pelayanan informasi melalui PPID.

Secara umum, pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja (Senin – Kamis 07.30 – 15.30 dan Jumat 07.30 – 14.30 dengan waktu istirahat 12.30 – 13.00). Sementara untuk layanan UPIK dan JSS dapat dimanfaatkan setiap hari.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta melekat pada Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Secara khusus, ketugasan tersebut diampu oleh Kelompok Substansi Layanan Informasi Dan Pengaduan pada Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan ketugasan tersebut, dibutuhkan tenaga Arsiparis, Pustakawan, Pranata Hubungan Masyarakat, dan Pranata Komputer. Pada Tahun Anggaran 2021, terdapat empat orang pegawai yang melaksanakan kegiatan operasional pelayanan informasi dan dokumentasi. Dua diantara pegawai tersebut telah mengikuti Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, Pemerintah Yogyakarta secara rutin melakukan pengembangan kapasitas dengan menyelenggarakan rapat dan diseminasi informasi. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan diseminasi informasi terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. Sehingga dengan adanya diseminasi dan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya.

Mengingat pentingnya sinergi internal antar pengelola informasi publik, PPID Utama Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan koordinasi dan update informasi dengan PPID Pelaksana guna memantau perkembangan layanan dan mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masing-masing PPID Pelaksana. PPID Kota Yogyakarta juga berpartisipasi aktif pada Forum Koordinasi PPID tingkat DIY yang beranggotakan PPID utama Kabupaten/Kota/Pemda DIY serta Komisi Informasi Daerah DIY serta menghadiri acara-acara yang diselenggarakan pihak lain yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.

C. ANGGARAN

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan PPID seperti rapat koordinasi, workshop, diseminasi, dan FGD PPID serta pengelolaan informasi public di tingkat Kota Yogyakarta dibebankan dalam anggaran kegiatan Pengelolaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

Sementara untuk pengelolaan informasi publik di OPD, pembiayaan dibebankan pada anggaran masing-masing OPD. Pada Tahun 2022, anggaran murni untuk Pengelolaan Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Rp. 289.637.240,-Anggaran ini menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2022, terdapat 99 permohonan informasi melalui PPID yang diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun yang dari tahun sebelumnya.

Hal ini dikarenakan masyarakat semakin memahami akan kehadiran PPID sehingga masyarakat tidak ragu untuk mengajukan permohonan informasi. Permohonan informasi yang masuk melalui email sebanyak 16 permohonan, 3 permohonan langsung melalui meja pelayanan PPID di Mal Pelayanan Publik dan permohonan lainnya disampaikan melalui website. Sebagian besar informasi publik yang diminta digunakan untuk kepentingan akademis sedangkan tujuan penggunaan yang lain adalah untuk kelengkapan pengajuan izin serta bahan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Dari jumlah total tersebut, 66 permohonan dikabulkan seluruhnya dan 10 permohonan informasi yang diberikan sebagian. 13 permohonan informasi ditolak dengan alasan 3 informasi yang dikecualikan, 7 karena informasi tidak dikuasai dan 2 lainnya karena Pemohon tidak dapat melengkapi syarat permohonan dan 1 lainnya karena tidak bersungguh-sungguh.

Rincian Pelayanan Informasi Publik terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen ini.

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2022 terdapat satu kasus Sengketa Informasi Publik antara PPID Utama Kota Yogyakarta dengan Pemohon Informasi yaitu Saudara MHS. Keberatan disampaikan oleh pemohon kepada Komisi Informasi Daerah DIY sehingga terjadi sengketa informasi. Keberatan diajukan karena pemohon tidak mendapatkan permohonan informasi sesuai yang dimintakan.

Permohonan informasi yang diajukan adalah mengenai data tentang nama isteri dan anak pejabat eselon 2 dan 3 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kasus Sengketa Informasi Publik ini berakhir dengan putusan gugur pada tanggal 7 Juli 2022.

V. CAPAIAN PPID

Selama tahun 2022, PPID Pemerintah Kota Yogyakarta telah meraih beberapa pencapaian berikut :

1. Pengembangan website jogjakota.go.id sebagai wajah Pemerintah Kota Yogyakarta yang diupayakan memenuhi standar keterbukaan informasi, sehingga memperoleh penghargaan terbaik pertama tingkat nasional pada ajang AMH 2022.
2. Peringkat Pertama Badan Publik Informatif pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Daerah DIY tahun 2022

VI. KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- a. Kompetensi pelaksana dalam memberikan pelayanan informasi publik baik pada PPID Utama maupun PPID Pelaksana perlu ditingkatkan.

- b. PPID Pelaksana memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi publik namun belum sepenuhnya memahami aturan dan prosedur pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan Komisi Informasi.
- c. *Transfer of knowledge* terkait pelayanan informasi publik antar pegawai masih rendah.
- d. Penyusunan DIK terendala benturan aturan di masing-masing sektor.

VII. RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- a. Peningkatan kompetensi bagi petugas pelaksana layanan informasi publik melalui pelatihan dengan Komisi Informasi Daerah DIY maupun Pelatihan/Bimtek/Seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi RI.
- b. Pendampingan lebih intensif bagi Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- c. Melakukan pembaharuan terhadap Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

Yogyakarta, 31 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian
Selaku PPID Utama



Ignatius Trihastono, S.Sos.,MM.

Permohonan Informasi PPID Utama Kota Yogyakarta

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	3	3	1	0	1	2	0	1	1
2	Februari	3	3	2	2	0	1	0	0	1
3	Maret	14	10.0	11	10	1	2	0	2	0
4	April	7	3.8	5	3	2	2	2	0	0
5	Mei	3	4	3	3	0	0	0	0	0
6	Juni	12	7.3	11	10	1	1	1	0	0
7	Juli	8	4.6	9	4	2	2	0	2	0
8	Agustus	8	1.25	7	6	1	1	0	1	0
9	September	6	5.1	6	5	1	0	0	0	0
10	Oktober	11	1.5	0	0	0	2	0	1	1
11	November	9	5.6	9	8	1	0	0	0	0
12	Desember	12	1.5	12	12	0	0	0	0	0
	Total	96	3,3	76	63	10	13	3	7	3

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

*) Terdapat 3 (tiga) permohonan lainnya dengan langsung mengunjungi meja pelayanan PPID di Mal Pelayanan Publik

Permohonan Informasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian			Dikecualikan	Tidak Dikuasai
1	Januari	2	12	1	0	1	0	0	0	1
2	Februari	1	1	0	0	0	0	0	0	1
3	Maret	1	5	1	1	0	0	0	0	0
4	April	1	1	1	1	0	0	0	0	0
5	Mei	1	5	1	1	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	2	1	2	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	1	1	1	0	1	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	5	1	1	0	0	0	0	0
11	November	1	0	1	1	0	0	0	0	0
12	Desember	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	Total	12								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	2	4	2	2	0	0	0	0	0
3	Maret	1	9	1	1	0	0	0	0	0
4	April	1	1	1	1	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	2	0	2	2	0	0	0	0	0
	Total	6								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	1	5	0	0	0	0	0	1	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	1	1	0	1	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	1	5	1	1	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	3								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian			Dikecualikan	Tidak dikuasai
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	1	9	1	1	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	9	1	1	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	0	1	1	0	0	0	0	0
11	November	1	0	1	1	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	4								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Pertanian dan Pangan

No	Bulan	Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian			Dikecualikan	Tidak Dikuasai
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	1	6	1	1	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Pariwisata

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	1	9	1	1	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	1	1	1	1	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	0	1	1	0	0	0	0	0
11	November	2	12	2	2	0	0	0	0	0
12	Desember	1	3	1	1	0	0	0	0	0
	Total	6								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Kesehatan

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	4	14	4	4	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	1	7	1	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	5								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	1	10	1	0	1	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	1	0	1	1	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Perhubungan

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	1	6	0	0	0	1	0	1	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Bulan	Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian			Dikecualikan	Tidak Dikuasai
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	1	14	1	1	0	0	0	1	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	1	6	1	1	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	2	0	0	0	0	0	0	1
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	1	5	1	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	0	0	0	0	1	0	0	1
11	November	1	11	1	0	1	0	0	0	0
12	Desember	2	2	2	2	0	0	0	0	0
	Total	6								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Lingkungan Hidup

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	6	1	0	1	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Inspektorat

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	3	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	3	1	1	0	0	0	0	0
7	Juli	3	4	1	0	1	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	4								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Bagian Hukum

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian			Dikecualikan	Tidak dikuasai
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	1	1	0	0	0	1	0	1	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	5	3	5	0	0	0	0	0	0
9	September	1	0	1	1	0	0	0	0	0
10	Oktober	2	4	2	2	0	0	0	0	0
11	November	1	11	1	1	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	9								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Kemantren Wirobrajan

No	Bulan	Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	1	5	1	0	1	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Dinas Kebudayaan

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian			Dikecualikan	Tidak Dikuasai
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	1	5	1	0	1	0	0	0	0
10	Oktober	1	0	1	1	0	0	0	0	0
11	November	1	7	1	1	0	0	0	0	0
12	Desember	1	3	1	1	0	0	0	0	0
	Total	4								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Bulan	Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	2	1	2	1	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

Permohonan Informasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Bulan	Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	2	1	2	1	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2								

*) Penolakan permohonan informasi dengan alasan lainnya dikarenakan pemohon tidak bisa melengkapi syarat permohonan

No	Nama OPD	Bulan												Jumlah	Waktu/ Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec				Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Lainnya
1	Satuan Polisi Polisi Pamong Praja	NIHIL																				
2	Bagian Tata Pemerintahan																					
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat																					
4	Bagian Perekonomian Dan Kerjasama																					
5	Bagian Administrasi Pembangunan																					
6	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa																					
7	Bagian Organisasi																					
8																						
9	Dinas Perdagangan																					
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																					
11	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga																					
12	Sekretariat DPRD																					
13	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan																					
14	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana																					
15	Jogjatama Visehsa																					

16	Bank Jogja
17	PDAM Tirtamarta
18	RSUD Kota Yogyakarta
19	Kemantren Tegalrejo
20	Kemantren Gondokusuman
21	Kemantren Jetis
22	Kemantren Danurejan
23	Kemantren Gedongtengen
24	Kemantren Ngampilan
25	Kemantren Mantrijeron
26	Kemantren Kraton
27	Kemantren Gondomanan
28	Kemantren Pakualaman
29	Kemantren Mergangsan
30	Kemantren Kotagede

NIHIL